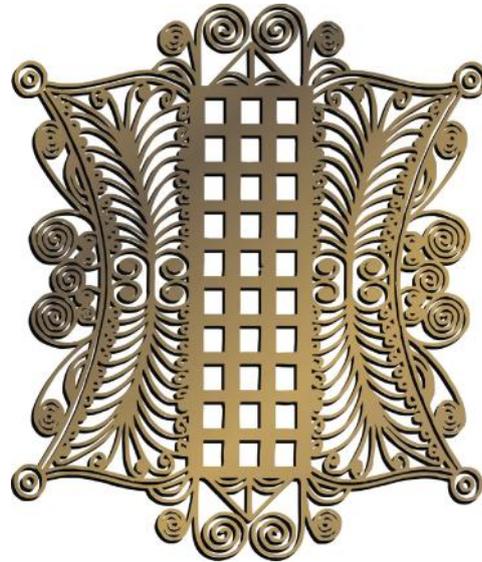


LAPORAN KINERJA

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH
TAHUN 2018**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH
BANDA ACEH
2019**

PENGANTAR

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan berfungsi, antara lain sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPBA menuju pelayanan penanggulangan bencana yang berorientasi hasil dan berbasis kinerja. Selain itu laporan kinerja ini juga sebagai wujud transparansi sekaligus alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja sekretariat serta bidang-bidang teknis di lingkungan BPBA.

Kinerja BPBA diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BPBA. Secara umum capaian kinerja telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan, namun salah satu sasaran belum menunjukkan capaian sesuai target, sekalipun telah mendapat dukungan optimal dari segenap komponen aparatur BPBA. Kurang berhasilnya capaian target kinerja penyaluran bantuan logistik kebencanaan sangat dipengaruhi dan tergantung pada ketersediaan atau alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut. Dengan kata lain, target indikator kinerja yang ditetapkan kurang mendapat dukungan pembiayaan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang disampaikan melalui laporan kinerja BPBA T.A 2018 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektifitas, dan produktivitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan BPBA pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja BPBA dalam mewujudkan penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko bencana.

Banda Aceh, 2018
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH
KEPALA PELAKSANA.

H.T. AHMAD DADEK, SH
PEMBINA UTMA MUDA
NIP. 19681129 199403 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Umum	1
B. Organisasi BPBA	1
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	3
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018	
A. Capaian Kinerja Penguatan Kelembagaan	7
B. Capaian Kinerja Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan	8
C. Capaian Kinerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi	9
D. Capaian Kinerja Kedaruratan dan Logistik	11
E. Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh	13
F. Realisasi Anggaran	28
BAB IV PENUTUP	31

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada umumnya risiko bencana alam meliputi bencana akibat faktor geologi (gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi), bencana akibat hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, penyakit tanaman/ternak, hama tanaman) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, pencemaran bahan kimia). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar manusia akibat perebutan sumber daya yang terbatas, alasan ideologi, religius serta politik.

Kompleksitas dari permasalahan bencana tersebut memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Pelayanan penanggulangan yang dilakukan selama ini mengikuti arah pergeseran paradigma penanggulangan bencana yang fokus pada upaya penanggulangan saat terjadi bencana bergeser ke arah pencegahan (prevensi) atau mengurangi risiko bencana.

Secara umum capaian kinerja penanggulangan bencana seperti yang ditargetkan dalam RPJMA 2017 – 2022, menunjukkan perkembangan yang baik, meskipun salah satu indikator masih memerlukan kerja keras dan perhatian baik secara internal BPBA maupun komitmen pendanaan yang memadai dari instansi pemerintah lainnya terutama yang berwenang dalam menetapkan alokasi anggaran pemerintah. Sedangkan tingkat capaian kinerja sasaran BPBA sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2018 yaitu 88,68 % yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran. Dari 6 sasaran strategis dan 6 indikator kinerja yang ditetapkan seluruhnya tercapai/berhasil. Sasaran dinyatakan berhasil jika capaiannya $\geq 75\%$ dari target yang telah ditetapkan.

Kedepan untuk mencapai visi BPBA yaitu ***“Masyarakat Aceh Tanggap dan Tangguh Menghadapi Bencana”*** diperlukan dukungan pendanaan yang mencukupi, kualitas dan kuantitas aparatur yang baik serta koordinasi dengan berbagai instansi baik lingkungan Sekretariat Daerah Aceh maupun dengan BPBD kabupaten/kota. Mengingat berbagai target hanya dapat dicapai dengan dukungan pendanaan yang cukup, melibatkan aparatur yang terampil dan koordinasi yang baik dengan berbagai instansi lain, dalam penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana yang berorientasi hasil dan berbasis kinerja serta bertujuan untuk melayani masyarakat terdampak bencana.

Untuk mendukung capaian kinerja, tahun 2018 BPBA telah membelanjakan anggaran Rp. 91.263.222.629, realisasinya **91.29 %** (Rp. 83.318.634.156). Dipastikan realisasi tersebut sedikit lebih kecil dari pada target yaitu 0.71 % dari target.

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBA.....	5
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	6
Tabel 3.1	Perkembangan Kinerja Penguatan Kelembagaan PB.....	8
Tabel 3.2	Perkembangan Kinerja Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Bencana	9
Tabel 3.3	Perkembangan Kinerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi	10
Tabel 3.4	Perkembangan Kinerja Kedaruratan dan Logistik	13
Tabel 3.5	Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	19
Tabel 3.6	Ikhtisar Hasil Pemantauan dan Penilaian Pelaksanaan Program/Kegiatan PB	21
Tabel 3.7	Komposisi Paket Bantuan Logistik Kebencanaan	27
Tabel 3.8	Realisasi Keuangan BPBA	28
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran BPBA	29
Tabel 3.10	Perkembangan Persentase Kesiapsiagaan Masyarakat dan Pemerintah dalam Menghadapi Bencana	30

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Indikator Kinerja Utama (IKU)	30
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	31
Lampiran 3. Rekapitulasi Kejadian Bencana Aceh 2014 – 2018	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Aceh saat ini telah bergerak mengikuti sistem penanggulangan bencana Nasional. Seiring perjalanan waktu telah terjadi perubahan cara pandang penanggulangan bencana dari yang bersifat tanggap darurat menuju ke arah pengurangan risiko bencana. Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) berdasarkan tugasnya telah melaksanakan fungsi tersebut untuk mewujudkan tercapainya sasaran sebagaimana tercantum dalam Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJM Aceh) periode tahun 2017 – 2022.

Mengingat pentingnya penanggulangan bencana tersebut, maka dalam rangka mendukung arah pembangunan sebagaimana ditegaskan dalam Qanun Aceh dimaksud, Pemerintah Aceh telah menetapkan 10 prioritas pembangunan Aceh dan menempatkan prioritas penanggulangan bencana pada urutan ke 10 dalam kebijakan bidang kualitas lingkungan dan kebencanaan.

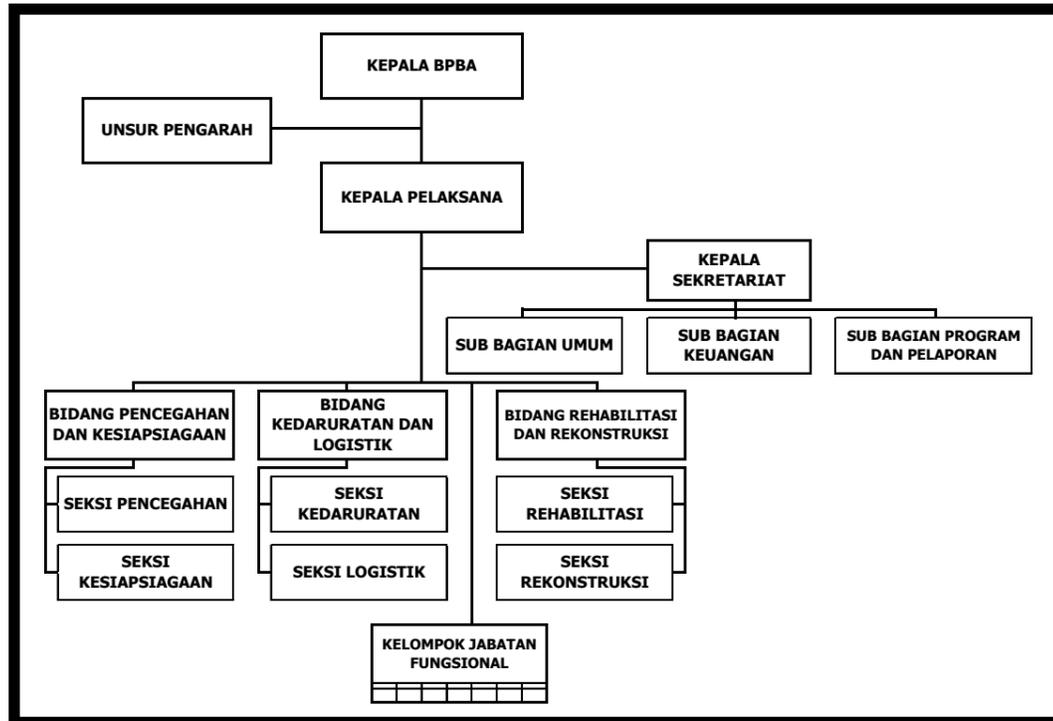
Dalam rangka melaksanakan amanat strategis tersebut, Gubernur Aceh telah memberikan tugas pokok kepada Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) sesuai dengan Qanun Aceh No. 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh untuk menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan bencana untuk dapat membantu gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Aceh. Tugas tersebut harus senantiasa dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, efektif, efisien dan akuntabel.

B. Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Aceh

Organisasi menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh. Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, organisasi Badan Penanggulangan Bencana Aceh terdiri dari Kepala Sekretariat, dan tiga bidang teknis yaitu Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta didukung oleh unsur pengarah dan kelompok jabatan fungsional. Khusus untuk jabatan fungsional hingga tahun 2018 belum terisi dengan pejabat fungsional. Adapun struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Aceh adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH



Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh merupakan pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana.

Anggota unsur pengarah terdiri dari unsur instansi pemerintah dan unsur masyarakat profesional/pakar yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional ditetapkan berdasarkan prosedur pemilihan dan seleksi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPBA harus dijiwai dengan semangat dan komitmen melakukan pelayanan penanggulangan bencana yang berbasis pada hasil dan berorientasi pada kinerja. Untuk mewujudkan hal tersebut telah ditetapkan Visi dan Misi BPBA yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi. Visi dan Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi (*strategic gola*).

Dalam pelaksanaannya, Rencana strategis BPBA 2017 - 2022 telah mengalami revisi yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahunan. Demikian juga Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

VISI

“Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Bersih, Adil dan Melayani”

Dalam visi ini terkandung maksud sebagai berikut :

Aceh Yang Damai, Bermakna perdamaian berlangsung secara berkelanjutan dengan memmanifestasikan prinsip – prinsip MoU Helsinki dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan.

Aceh yang Sejahtera, Bermakna rakyat Aceh memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, Pendidikan, Perumahan dan Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan serta pendapatan yang layak.

Pemerintahahn yang Bersih, Adil dan Melayani, Bermakna tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi guna mendukung pelayanan publik yang murah, cepat sasaran berkualitas dan merata.

Sejalan dengan visi Gubernur Aceh maka diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi BPBA. Selanjutnya misi diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPBA.

MISI

“ Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur terintegrasi dan Lingkungan yang berkelanjutan ”

Tujuan, Sasaran dan Strategi yang ingin diwujudkan oleh BPBA pada lima tahun mendatang menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh BPBA. Dengan berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka BPBA merumuskan tujuan strategis sebagai berikut :

TUJUAN:

“ Meningkatkan tatakelola Kebencanaan ”

SASARAN:

“ Pengarusutamaan Pengurangan resiko Bencana dalam Pembangunan ”

STRATEGIS:

“ Meningkatkan Upaya Mitigasi dan Adaptasi Pengurangan Risiko Bencana Alam ”

Visi dan misi BPBA tersebut telah sejalan dengan misi , tujuan, sasaran dan strategi untuk pencapaian pembangunan Pemerintah Aceh selama periode tahun 2017-2022 yang juga didukung oleh 15 Unggulan Aceh Hebat yang mana BPBA di Unggulan Aceh Green yang didalamnya menjelaskan Tentang Penegasan terhadap Pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang sensitif terhadap resiko bencana alam dengan konsep pembangunan yaitu Menerapkan Strategi Mitigasi Dan Manajemen Resiko Bencana Melalui Penguatan Kapasitas Tim Tanggap Darurat dan Penyadartahuan Masyarakat.

Berdasarkan RPJM Aceh 2017 – 2022 tersebut pelayanan penanggulangan bencana menjadi tugas BPBA dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 93 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Aceh, Satuan Kerja Perangkat Aceh dan Biro di Lingkungan Pemerintah Aceh, di bawah ini merupakan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Aceh.

TABEL 2.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET				
				2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Persentase sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana	%	60	65	70	75	80
2.	Meningkatnya ketrampilan aparatur dan masyarakat dalam menanggulangi bencana	Persentase Pemerintah Kab/Kota siaga bencana.	%	80	85	90	95	95
		Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	%	80	85	90	95	95

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: (1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (5) sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja tahun 2018 merupakan tahun terakhir penerapan Renstra BPBA, sehingga capaian kinerjanya mencerminkan capaian strategi BPBA sebelum berakhirnya Pemerintahan Aceh periode 2017 – 2022. Perjanjian Kinerja BPBA Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat tabel dibawah ini.

TABEL 2.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penanggulangan bencana	- Persentase sarana dan prasana pendukung penanggulangan bencana	85,50%
2.	Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah kab/kota dalam menghadapi bencana	- Persentase pemerintah kabupaten/kota siaga bencana	85,50%
3.	Meningkatnya koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	- Persentase rekomendasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang ditindaklanjuti	90,00%
4.	Meningkatnya fungsi layanan publik dalam wilayah terjadinya bencana	- Persentase fungsi layanan publik dalam wilayah terjadinya bencana	95,55%
5.	Meningkatnya perbaikan lingkungan daerah bencana	- Persentase perbaikan lingkungan daerah bencana	95,50%
6.	Meningkatnya koordinasi penanganan kedaruratan dan logistik kebencanaan	- Persentase ketepatan waktu, jenis bantuan dan kebutuhan korban bencana pada masa tanggap darurat	80,00%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana pada hakikatnya merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat guna siap siaga dalam menghadapi bencana. Siklus manajemen penanggulangan bencana itu sendiri terdiri dari fase pra bencana –saat tidak terjadi bencana--, saat terjadi bencana –darurat bencana- dan pasca peristiwa terjadinya bencana – rehabilitasi dan rekonstruksi-. Harapan terakhir dari serangkaian proses pelayanan penanggulangan bencana tersebut adalah terwujudnya aparatur dan masyarakat siap, tanggap dan mampu melakukan upaya-upaya mitigasi maupun adaptasi bencana.

Sesuai dengan Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) periode 2017 – 2022 bahwa Penegasan terhadap pembangunan berwawasan Lingkungan yang berkelanjutan yang sensitif terhadap risiko bencana alam dengan konsep Pembangunan, antara lain dengan menerapkan strategi mitigasi dan manajemen risiko bencana melalui penguatan kapasitas tim tanggap darurat dan penyadartahuan masyarakat.

Keberhasilan pelayanan penanggulangan bencana tercermin melalui berkurangnya indeks risiko bencana di daerah dan meningkatnya indeks kapasitas daerah yang dilakukan dengan mempedomani 71 Indikator Kapasitas Daerah dan pada akhirnya mendukung terwujudnya masyarakat Aceh yang tanggap dan tangguh mengadapi bencana.

A. Capaian Kinerja Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan penguatan kelembagaan penanggulangan bencana telah dilaksanakan pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, pelatihan teknis aparatur yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana baik yang berasal dari BPBA maupun BPBD kabupaten/kota, dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan lapangan penanggulangan bencana.

Secara umum capaian kinerja penguatan kelembagaan menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun, meskipun masih memerlukan kerja keras dan perhatian tidak hanya dari BPBA, namun juga komitmen dari para pihak lainnya terutama Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) untuk mengalokasikan anggaran dalam jumlah yang memadai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tabel 3.1										
PERKEMBANGAN KINERJA										
PENGUATAN KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA										
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2013 (BASE LINE)	REALISASI					TARGET 2018	REALISASI 2018	TINGKAT CAPAIAN (%)
			2014	2015	2016	2017	2018			
Meningkatnya kualitas dan kuantitas peralatan untuk mendukung kegiatan pelayanan penanggulangan bencana	Jumlah Gedung Workshop pemadam kebakaran	1	0	1	0	0	3	3	3	100
	Jumlah kendaraan operasional evakuasi darurat bencana	0	0	5	0	3	13	13	13	100
	Panjang jalan dan saluran pada landscape gudang logistik kebencanaan	0	0	447	412	0	0	0	0	-
	Pembangunan Gudang Logistik	0	0	0	0	0	1	1	3	100
	Pengadaan Sarana PB	0	0	0	0	0	6	6	8	100
	Jumlah aparatur yang terampil dalam penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana	200	230	360	400	777	134	134	302	100
	Jumlah genset mini	0	0	0	16	0	0	1	0	-
	Jumlah mobil minibus rescue	0	0	0	1	0	0	1	1	100
	Jumlah kendaraan bok logistik	0	0	0	1	0	0	0	0	-
	Jumlah Toilet Portable	0	0	0	0	360	0	1	1	100
	Peralatan Pemadam kebakaran	0	0	0	0	324	1	1	2	100

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja penguatan kelembagaan penanggulangan bencana menunjukkan capaian optimal (99%). Melihat capaian kinerja yang disajikan pada tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sarana penanggulangan bencana mengalami peningkatan jumlah dan kualitas dari tahun ke tahun. Dalam perjanjian kinerja antara Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Aceh dengan Gubernur Aceh target kinerja peningkatan.

B. Capaian Kinerja Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Bencana

Lingkup daerah kebijakan penanggulangan bencana Aceh adalah seluruh wilayah Aceh. Pencegahan dini dan kesiapsiagaan bencana diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat kelompok rawan bencana khususnya yang berdomisili dalam kawasan rawan bencana zona prioritas provinsi sebagaimana telah diuraikan di atas. Pada dasarnya, pelaksanaan pencegahan dini dan kesiapsiagaan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Seiring dengan semakin solid dan menguatnya kapasitas kelembagaan, BPBA pada Tahun anggaran 2018 telah melaksanakan satu kali simulasi/drill bencana Tsunami di Kabupaten Aceh Besar. Penyusunan Rencana Kontijensi yang dilaksanakan di Kabupaten Pidie Jaya. Keikutsertaan BPBA dalam Bulan Pengurangan Risiko Bencana yang diselenggarakan di Sumatera Utara.

Tabel 3.2										
PERKEMBANGAN KINERJA										
PENCEGAHAN DINI DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA										
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2013 (BASE LINE)	REALISASI					TARGET 2018	REALISASI 2018	TINGKAT CAPAIAN (%)
			2014	2015	2016	2017	2018			
Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan simulasi/drill bencana	186	720	800	500	530	507	450	507	100
	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	2	1	0	0	1	1	1	1	100

Tabel di atas menjelaskan capaian kinerja pencegahan dini dan representasi kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Diukur melalui jumlah masyarakat dan aparatur pemerintah kabupaten/gampong tempat simulasi/drill dilangsungkan terlibat/berpartisipasi secara aktif. Secara gradual dari tahun ke tahun menunjukkan tingkat partisipasi yang semakin baik. Tahun 2018 ditetapkan target 450 orang, realisasinya mencapai 507 orang. Dalam perjanjian kinerja antara Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh dengan Gubernur Aceh ditetapkan target kinerja sebesar 85,50%. Jika capaian diatas digunakan sebagai acuan maka capaian kinerja dimaksud dapat melampaui target. Hal tersebut patut dan layak diapresiasi sebagai wujud partisipasi yang nyata dan menjadi modal dasar dalam mencegah timbulnya korban jiwa pada saat terjadi bencana alam.

C. Capaian Kinerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana menegaskan bahwa ruang lingkup pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana dilakukan melalui kegiatan- kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, pemulihan

keamanan dan ketertiban umum, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik (pasal 56, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana). Tahun Anggaran 2018 BPBA relevan dengan anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Aceh Nomor 1.01.05.02 tanggal 27 Maret 2018 menjalankan fungsi, Inventarisasi, Verifikasi dan Validasi kerusakan Akibat bencana, Perbaikan Lingkungan daerah Bencana, Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik dalam wilayah terjadinya bencana, koordinasi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi dan Penilaian Kerusakan bencana.

Tabel 3.3										
PERKEMBANGAN KINERJA										
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI 2013 – 2018										
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2013 (BASE LINE)	REALISASI					TARGET 2018	REALISASI 2018	TINGKAT CAPAIAN (%)
			2014	2015	2016	2017	2018			
Meningkatnya koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi	Jumlah dokumen laporan koordinasi pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	2	2	2	1	0	1	1	1	100
	Jumlah Pembangunan Tanggul Sungai	na	0	0	0	0	7	7	7	100
	Jumlah Jalan dan Pembangunan Kembali Jembatan Provinsi	na	0	0	0	0	2	2	2	100
	Jumlah Aparatur yang terlatih dalam penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	na	0	0	0	0	150	150	112	100
	Jumlah rekomendasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	6	7	5	8	4	1	1	1	100

Kinerja rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana menunjukkan tingkat konsistensi yang tinggi dari tahun ke tahun dan dapat memenuhi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja antara Kepala Pelaksana BPBA dengan Gubernur Aceh tahun 2018 sebesar 95,55 % . Pada sisi yang lain, hal tersebut menunjukkan monotonnya pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang diselenggarakan BPBA. Dengan kata lain kondisi seperti tersebut memberi indikasi bahwa terdapat beberapa jenis layanan sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dijabarkan di atas yang masih memungkinkan untuk dilaksanakan pada tahun yang akan datang jika didukung dengan anggaran dalam jumlah yang memadai.

D. Capaian Kinerja Kedaruratan dan Logistik Bencana

Secara umum kesuksesan penyaluran bantuan logistik bencana bersandar pada empat hal utama, yakni tempat atau titik masuknya logistik, gudang utama, gudang penyaluran dan terakhir gudang penyimpanan akhir (jika diperlukan). Keempat sandaran ini akan ditentukan oleh faktor informasi - komunikasi, jalur dan sistem distribusi, sarana transportasi suplay dan manajemen persediaan atau *stock management*.

Untuk mengefektifkan fungsi koordinasi peralatan dan logistik kemanusiaan pada fase darurat bencana, BPBA sekurang-kurangnya berpijak pada lima *variable* penting dalam sistem manajemen logistik bencana. Pertama, kesiapan petugas atau aparatur. Operasional logistik sangat bergantung pada petugas atau aparatur yang terampil, terlatih, dan cekatan. Kebutuhan petugas atau aparatur suplai logistik bencana dapat dipenuhi melalui *recruitment* Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga kontrak/pegawai tidak tetap dan sukarelawan. Masyarakat sekitar, terutama karang taruna dapat diberdayakan menjadi sukarelawan setelah mendapat bimbingan teknis yang memadai. Mereka merupakan garda terdepan dalam proses penyiapan rantai pasok dari awal sampai dengan titik tujuan bencana. Di luar negeri, seperti Amerika Serikat, penyiapan kader logistik sudah ditangani secara serius dan profesional. Tiap tahun, misalnya, *Federal Emergency Management Agency (FEMA)* menyelenggarakan acara yang dikenal dengan "*Logistic Management Boot Camp*" yang sebagian besar diisi dengan pelatihan dan simposium.

Kedua, terkait fungsi perencanaan. Pada kondisi darurat sering kali ditemukan proses distribusi yang kacau balau, tidak adanya garis komando, tumpang tindih fungsi kerja, dan sebagainya. Hal-hal seperti ini dapat dimaklumi dalam jangka waktu tertentu, namun tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Harus ada fungsi pengendalian yang direncanakan diawal. Pada saat pra bencana, fungsi perencanaan bertujuan mengetahui seberapa banyak jumlah korban yang membutuhkan bantuan logistik, mengetahui berapa banyak bantuan logistik yang dibutuhkan, mengetahui jenis kebutuhan (sandang papan, dan pangan), mengetahui cara menyampaikan bantuan, mengetahui kapan bantuan harus diberikan, dan terakhir mengetahui siapa penanggung jawab kelompok penerima bantuan. Dalam tataran yang lebih luas, fungsi perencanaan mampu berbicara dengan berbagai level scenario, antara lain perencanaan saat kejadian bencana, perencanaan pascabencana, perencanaan rehabilitasi dan konstruksi.

Ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana. Aspek ini meliputi penyediaan sarana dan prasarana untuk proses penyimpanan (gudang) dan proses distribusi (berbagai moda transportasi, darat, laut, dan udara).

Keempat, terkait keterlacakan dan akuntabilitas. Harus dicarikan solusi alternatif bagaimana membangun sebuah sistem yang mampu menyuguhkan data stok dan posisi

bantuan secara "real time" dan terhubung ke semua pemangku kepentingan yang terkait. *FEMA USA* misalnya, telah memiliki *Logistic Visibility Tools (LogVIZ)* yang mampu menampilkan data secara cepat, akurat, transparan, dan terkoneksi secara baik. Tidak kalah penting adalah kerja sama dan kolaborasi dengan sektor swasta seperti donatur, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain.

Berkaitan dengan penyaluran logistik kemanusiaan sebagaimana diuraikan di atas BPBA sejak tahun 2013, bidang Kedaruratan dan Logistik telah menjalankan fungsi tersebut sebagaimana diamanatkan Qanun Aceh Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh. Ketersediaan jumlah personil dan peralatan pendukung logistik yang semakin membaik dari tahun ke tahun berdampak yang sangat signifikan terhadap peningkatan kinerja bidang terkait.

Untuk kelancaran proses penyelenggaraan pelayanan kedaruratan dan logistik bencana, disediakan prasarana dan sarana pendukungnya berupa:

- ❖ Personil piket Pusat Kendali Operasi (PUSDALOPS) bencana yang siaga dua puluh empat jam.
- ❖ Ruang kerja, peralatan komunikasi, ruang istirahat petugas Pusdalops yang nyaman.
- ❖ Dukungan unsur pengarah profesional.
- ❖ Peralatan dan perlengkapan kerja lapangan Tim Reaksi Cepat (TRC).
- ❖ Peralatan pencarian dan penyelamatan korban bencana.
- ❖ Gudang logistik yang representative.
- ❖ Kenderaan operasional *rescue*, seperti kenderaan roda empat dan kenderaan khusus perairan dangkal seperti perahu *polyethilen* dan lain-lain.

Tabel 3.4										
PERKEMBANGAN KINERJA KEDARURATAN DAN LOGISTIK										
TAHUN 2013 – 2018										
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2013 (BASE LINE)	REALISASI					TARGET 2018	REALISASI 2018	TINGKAT CAPAIAN (%)
			2014	2015	2016	2017	2018			
Meningkatnya koordinasi penanganan kedaruratan dan logistik kebencanaan	Jumlah laporan operasional pusat kendali operasi dan laporan penilaian cepat kerusakan akibat bencana	1	1	2	1	1	1	1	1	100
	Jumlah paket bantuan logistik kebencanaan	16	16 (55,00 KK)	18 Paket	0	11700 KK	19 Paket	19 Paket	19 Paket	100
	Persentase Ketetapan Waktu, Jenis Bantuan dan Kebutuhan KOrban Bencana Pada Masa Tanggap Darurat	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100

Keberhasilan layanan kedaruratan dan logistik kebencanaan tergambarkan dari bekerjanya Pusdalops penanggulangan bencana dan tersalurkannya bantuan logistik masa darurat bencana di kabupaten/kota yang dilanda bencana alam. Tahun 2018 jumlah laporan pelaksanaan Pusdalops berjumlah 1 laporan dan memenuhi target.

Layanan bantuan logistik darurat bencana cenderung meningkat dari tahun ke tahun. *Baseline* tahun 2013, jumlah paket bantuan logistik yang disalurkan yaitu 16 paket, meningkat menjadi 17 paket pada tahun 2014, meningkat menjadi 18 paket pada 2015, dan 18 paket pada tahun 2016. Pada 2018 meningkat lebih lanjut menjadi 19 paket. Namun, layanan tersebut belum mampu menjangkau seluruh masyarakat yang terdampak bencana. Metode penyaluran bantuan logistik tersebut yaitu bersifat selektif dan sangat dipengaruhi oleh permintaan pemerintah kabupaten/kota yang terdampak bencana.

E. Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA)

Pengukuran tingkat capaian kinerja BPBA dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2018 antara Kepala Pelaksana BPBA dengan Gubernur Aceh. Secara keseluruhan Target capaiannya sebesar 88,0 % yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian

sasaran strategis. Dari enam sasaran strategis dan enam indikator kinerja yang ditetapkan dalam PK T.A 2018 seluruhnya tingkat capaiannya mencapai 91,29 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat capainnya kurang dari 100%. Sasaran dinyatakan berhasil jika capaiannya $\geq 75\%$ dari target yang ditetapkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa BPBA **BERHASIL** menyelenggarakan pelayanan penanggulangan bencana pada T.A 2018.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja BPBA sebagaimana telah ditetapkan, diuraikan berdasarkan indikator sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut:

Pelayanan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien digambarkan pada bagaimana layanan penanggulangan bencana yang tepat fungsi dan ukuran dengan memenuhi tingkat kesesuaian dan harapan masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas dan peran pembangunan khususnya urusan penanggulangan bencana yang didelegasikan kepada beberapa bidang dalam lingkup BPBA dinyatakan semakin efektif ditandai dengan layanan yang tepat sasaran baik pada masa pra bencana, saat kejadian bencana dan pada saat setelah terjadinya bencana. Sedangkan efisiensi pelaksanaan layanan digambarkan dalam sistem prosedur yang baik dengan rasio sarana dan prasarana kerja yang proporsional.

Untuk mewujudkan tujuan pelayanan penanggulangan bencana yang terkoordinir dengan dukungan fasilitas yang memenuhi standar dan tenaga yang terampil secara efektif, efesien dan terukur dalam tahun 2018 telah ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatnya koordinasi penanggulangan bencana.
- b. Meningkatnya kualitas peralatan untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana.
- c. Meningkatnya jumlah aparatur dan masyarakat yang terlatih menghadapi bencana.

Sasaran Meningkatkan Kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten/Kotadalam Menghadapi Bencana

1. Mewujudkan koordinasi penanggulangan bencana.

Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 13 tahun 2016 tentang Pemebentukan dan Susunan Perangkat Aceh. BPBA mempunyai tugas utama yaitu melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya. Dalam menjalankan tugas tersebut BPBA melakukan fungsi selain pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam tahapan pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana juga melakukan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Tahun 2018 menjadi tahun yang sangat strategis karena intensitas kejadian bencana yang sedemikian tinggi – terkait dengan anomali cuaca akibat iklim yang sudah berubah— namun kurang didukung dengan pembiayaan yang memadai. Dalam situasi yang demikian

BPBA mengandalkan strategi berupa mengoptimalkan fungsi koordinasi baik dengan SKPA Teknis lingkup Setda Aceh maupun dengan BPBD seluruh Aceh. Dengan demikian penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana dapat terlaksana secara cepat, tepat, efisien dan efektif.

BPBA dalam tahun 2018 sesuai dengan ketersediaan anggaran telah menyelenggarakan satu kali rapat koordinasi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan tema ***Sosialisasi Aplikasi e-Proposal Sebagai Perangkat Verifikasi Proposal Rehab Rekon Pasca Bencana***. Tema ini menjadi strategis untuk diangkat dalam forum tersebut untuk menjaga azas transparansi pelaksanaan program dan kegiatan. Rapat koordinasi tersebut menghadirkan narasumber pusat dan daerah. Para narasumber memaparkan arah kebijakan pembangunan nasional penanggulangan bencana secara spesifik, agar daerah dapat menyesuaikan program dan kegiatan penanggulangan bencana sehingga terjalin keterpaduan dan keserasian capaian output dan outcome. Rapat koordinasi dihadiri oleh seluruh kepala pelaksana BPBD kabupaten/kota beserta pejabat setingkat eselon III dan pejabat struktural lingkup BPBA dengan total jumlah 54 orang. Pada akhir rapat koordinasi tersebut dihasilkan rencana tindak lanjut berupa kesepakatan untuk mengharmonisasikan program dan kegiatan penanggulangan bencana.

Sasaran Peningkatan Kualitas Saran dan Prasarana Penanggulangan Bencana

1. Mewujudkan kualitas dan kuantitas peralatan penanggulangan bencana sesuai kebutuhan.

Peralatan penanggulangan bencana yang tersedia di lokasi harus dapat digunakan dalam keadaan situasi darurat oleh petugas bencana. Pada saat situasi darurat banyak diperlukan, seperti peralatan angkutan (transportasi) untuk evakuasi korban baik di darat, perairan udara (truk, perahu karet, helikopter, dan lain lain). Demikian pula peralatan lainnya, misalnya telekomunikasi, generator listrik, peralatan penyelamatan (peralatan diteksi dini, bulldozer, forklift, dan lain lain. Peralatan tersebut harus dapat diperoleh dengan cepat, tepat waktu, tepat lokasi, tepat sasaran, tepat jumlah, dan dapat berfungsi dengan baik.

Dalam penanggulangan bencana banyak kendala yang dihadapi oleh petugas terkait dengan penyediaan peralatan seperti tidak dapat digunakan secara optimal (rendah kualitas/cepat rusak), bahkan tidak memiliki informasi tentang dimana tempat yang memiliki kondisi layak pakai dan mudah di dapat. Ketika satuan tugas akan di berangkatkan ke lokasi bencana sering kali tidak memiliki informasi tentang tempat dimana peralatan mudah di dapat sehingga lambat dalam melakukan tindakan yang pasti dan tepat.

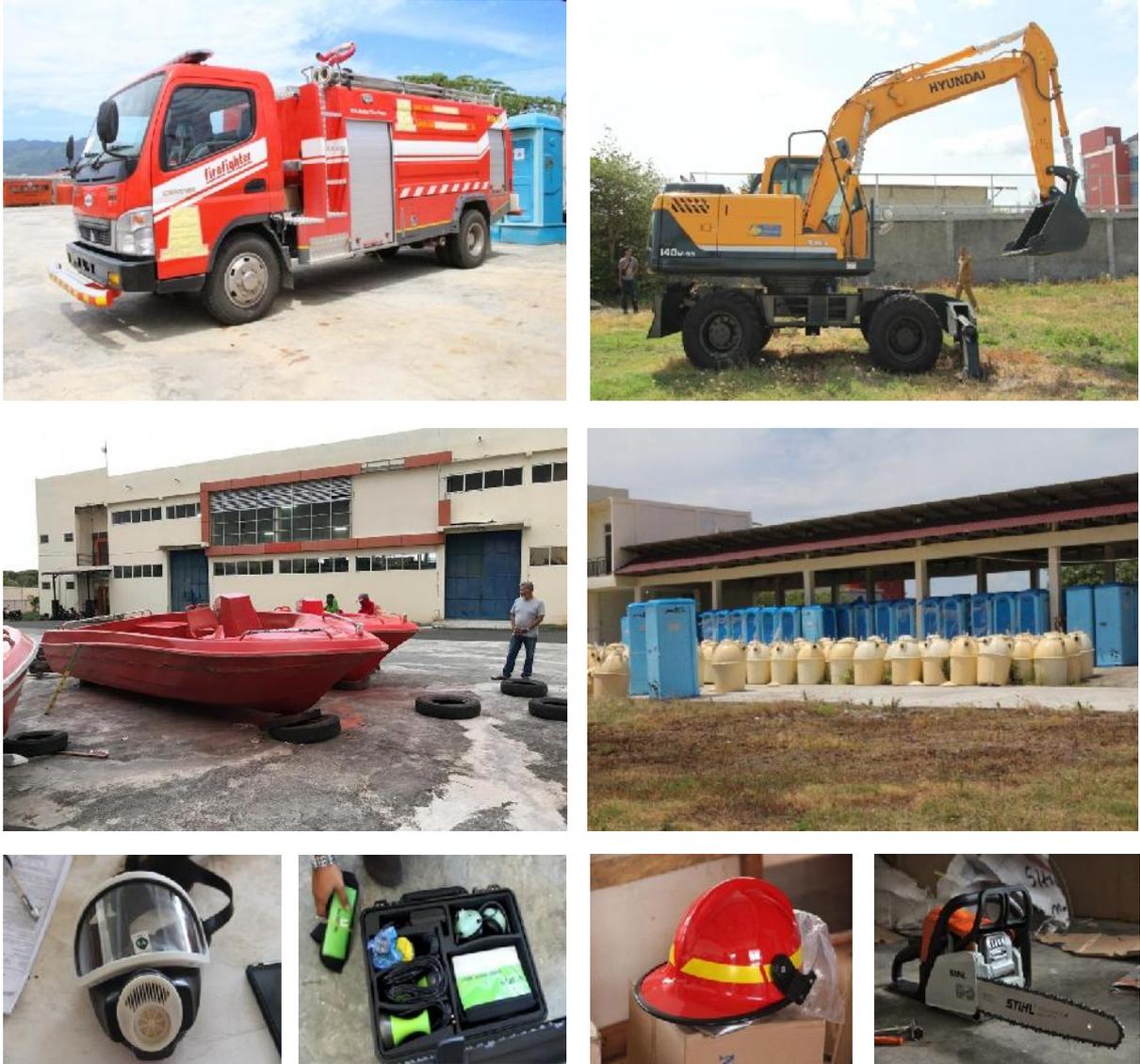
Penyediaan peralatan penanggulangan bencana pada hakekatnya pengumpulan data peralatan yang sudah tersedia atau dimiliki pemerintah, lembaga dan instansi yang mempunyai tanggungjawab dalam penanggulangan bencana. Peralatan penanggulangan bencana akan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam manajemen penanggulanagn bencana baik pada fase kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pasca bencana di daerah rawan bencana.

Pada saat ini BPBA belum memiliki peralatan penanggulangan bencana yang memadai dan lengkap, serta belum memiliki data dan informasi yang menerangkan lembaga atau SKPA mana yang memiliki peralatan yang siap dimobilisasi secara cepat pada saat dibutuhkan. Oleh karena itu, pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana merupakan langkah strategis untuk mendukung pelayanan penanggulangan bencana.

BPBA telah mengadakan beberapa peralatan atau prasarana dan sarana strategis penanggulangan bencana pada tahun anggaran 2018 untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana berupa pengadaan:

- ❖ Mobil pemadam kebakaran.
- ❖ Mobil EXCAVATOR
- ❖ Viber Boat
- ❖ Toilet Mobile
- ❖ Toilet portable dan biotank.
- ❖ Peralatan proteksi kebakaran dan alat bantu evakuasi bencana

Gambar 1. 2
Sarana dan Peralatan Pendukung Penanggulangan Bencana



Sumber : Rekam Jejak Tahun 2018

2. Mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana yang tepat sasaran

Pemantauan (monitoring) adalah prosedur penilaian yang secara deskriptif dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan/atau mengukur pengaruh dari kegiatan yang sedang berjalan (*on-going*) tanpa mempertanyakan hubungan kausalitas (Wollman, 2003:6). PP No.39 tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan membuat batasan definisi dari pemantauan yaitu kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul.

Evaluasi merupakan proses analitis menggunakan metodologi sosial-ilmiah untuk melihat apakah sebuah intervensi kebijakan (program, kegiatan) mengakibatkan output atau

hasil tertentu (King et al, 1987:17). PP No.39/2006 mendefinisikan Evaluasi sebagai serangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Lazimnya dikenal tiga jenis Evaluasi yaitu:

- ❖ Ex-ante (Evaluasi pada tahap perencanaan): evaluasi sebelum ditetapkan rencana pembangunan; Tujuan: memilih & menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif, kemungkinan cara mencapai tujuan yg telah ditetapkan sebelumnya.
- ❖ On-going (Evaluasi pada tahap pelaksanaan, pemantauan); Tujuan: mengetahui tingkat kemajuan pelaksanaan dibandingkan rencana.
- ❖ Ex-post (Evaluasi setelah pelaksanaan berakhir); Tujuannya adalah mengetahui apakah pencapaian (keluaran, hasil, dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan kemanfaatan dari suatu program.

Pelaksanaan program dan kegiatan baik yang diselenggarakan secara internal maupun yang diselenggarakan oleh BPBD kabupaten/kota secara acak dilakukan pemantauan. Harapan dari terlaksananya kegiatan ini adalah teridentifikasinya berbagai kekurangan dalam penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana sehingga membuka peluang untuk perbaikan pada tahun yang akan datang. Hasil pantauan pelaksanaan kegiatan tahun 2015 diperoleh gambaran bahwa terdapat berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana baik ditingkat provinsi maupun di kabupaten/kota.

Sasaran Meningkatnya Kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten/kota dalam Menghadapi Bencana

1. Mewujudkan ketrampilan dan keahlian aparatur

Dari sekian banyak kegiatan mitigasi, satu yang paling strategis adalah pembelajaran atau pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) baik kepada aparatur pelaksana pelayanan penanggulangan bencana maupun kepada masyarakat. DIKLAT merupakan wahana untuk membangun perilaku dan sikap positif dalam menghadapi bencana. Dalam referensi Biro Mitigasi Bakornas PBP (2005), mitigasi bencana yang berbasis pada masyarakat disebut paradigma pengurangan resiko yang berbasis DIKLAT.

Mitigasi bencana awalnya memang bersifat konvensional yang menganggap bencana sebagai suatu peristiwa atau kejadian yang tidak dapat dielakan dan tidak dapat dikurangi risikonya. Prinsip utamanya agar para korban segera mendapat pertolongan, sehingga fokusnya memberi bantuan atas kedaruratan (*emergency*). Pandangan kedua berkembang

menjadi paradigma antisipasi tujuannya lebih diarahkan kepada identifikasi daerah-daerah rawan bencana, mengenali pola-pola yang dapat menimbulkan bencana, dan penataan ruang. Pandangan ketiga adalah paradigma pembangunan yaitu bersifat pengintegrasian upaya penanganan bencana dengan program pembangunan, misalnya melalui perkuatan ekonomi, penerapan teknologi, pengentasan kemiskinan dan sebagainya. Pandangan keempat adalah paradigma pengurangan resiko. Dalam paradigma terakhir ini penanganan bencana bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparaturnya maupun masyarakat untuk mengelola dan menekan resiko terjadinya bencana. Pendekatan ini memandang masyarakat sebagai subyek dan bukan obyek dari penanganan bencana dalam proses pembangunan.

Pada paradigma pengurangan resiko, mitigasi sebagai kewajiban berbagai pihak, baik para ahli, pemerintah maupun masyarakat secara luas. Para ahli barangkali memiliki tugas untuk menjelaskan mekanisme dan proses terjadinya bencana seperti gempa, gunung api, longsor, atau banjir. Dengan berbasil ilmu pengetahuannya, para ahli memetakan tempat-tempat rawan bencana, dan kemudian membangun konsep DIKLAT sebagai upaya adaptasi. Dengan DIKLAT yang dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang diyakini dapat membentuk sikap dan perilaku positif yang dapat meningkatkan kapasitas dan pada akhirnya diharapkan mampu mereduksi kerentanan. Sehingga pada saat terjadi bencana aparaturnya maupun masyarakat dapat bertindak menolong atau menyelamatkan diri secara baik dan benar.

Guna mewujudkan peningkatan kapasitas aparaturnya pelaksana penyelenggara layanan penanggulangan bencana BPBA telah melaksanakan empat jenis DIKLAT pada tahun 2018 dengan narasumber dari dalam dan luar daerah (tabel. 6).

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA				
JENIS DIKLAT	TEMA DIKLAT	JUMLAH PESERTA (Org)	DURASI DIKLAT	TEMPAT
Pelatihan Penanggulangan Bencana	Pelatihan Sistem Komunikasi Alternatif Pada Saat Bencana	46	3Hari	Hotel Kyriad Muraya Banda Aceh
	Tangkas, terampil dan Handal Menangani Kebakaran Hutan dan lahan	46	3 Hari	Hotel Kyriad Muraya Banda Aceh

Beranjak dari ide yang menegaskan bahwa “belajar yang dilakukan berulang-ulang berpeluang meningkatkan keterampilan”, maka menjadi sebuah harapan bahwa dengan telah mengikuti DIKLAT tersebut, para aparatur yang terlibat secara langsung dalam proses penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana terutama yang berkaitan dengan penyusunan anggaran berbasis program. Sehingga berdampak pada peningkatan keahlian yang menunjang perencanaan.

Tabel 3.6

IHKTISAR HASIL PEMANTAUAN DAN PENILAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2018

PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN FAKTUAL	ALTERNATIF SOLUSI	RENCANA TINDAKLANJUT/PEMBELAJARAN	EVALUASI KEMUNGKINAN PERBAIKAN	
					MUNGKIN	TIDAK
INTERNAL/ BPBA						
Pencegahan dini dan kesiapsiagaan bencana	Pengurangan risiko bencana	Struktur pembiayaan kegiatan yang tidak sistematis sehingga berpengaruh pada hubungan sebab – akibat antara indikator keluaran dan target	Perencanaan anggaran untuk kegiatan simulasi/drill memerlukan review secara menyeluruh	Tinjauan pada mekanisme penetapan target kinerja dan proporsi anggaran yang tersedia	Ya	
Kedaruratan dan logistik kebencanaan	Manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana	Akurasi data kelompok sasaran penerima paket bantuan logistik kebencanaan yang berubah-ubah	<i>Screening dan up date</i> data secara real time dalam batas waktu tertentu (24 jam)	Pelatihan petugas pendataan/Tim Kaji Cepat.	Ya	
Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Koordinasi penilaian kerusakan bencana	Skala ukur data yang belum relevan (dominan kualitatif)	Pengukuran dengan mengikuti mekanisme dimensi tiga dan volumetric	Pelatihan JITUPASNA	Ya	
EKSTERNAL/BPBD KABUPATEN-KOTA						
Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Koordinasi penilaian kerusakan bencana	Terbatasnya alokasi anggaran regular dalam dokumen anggaran BPBD/Kabupaten/kota dan BTT.	Koordinasi dengan dinas keuangan Aceh khususnya dengan bidang yang mengevaluasi APBD kabupaten/kota	Instruksi Gubernur Aceh kepada Kepala Dinas Keuangan Aceh untuk mengevaluasi APBD kabupaten/kota khususnya pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dan jika tidak proporsional diberi catatan evaluasi.	Ya	
Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Koordinasi penilaian kerusakan bencana	Keterampilan staf yang sangat kurang	Pelatihan JITUPASNA secara berkala 2 kali dalam setahun	Alokasi anggaran DIKLAT singkat diperbesar	Ya (Tapi sulit dilakukan)	

2. Terwujudnya Pengurangan Risiko Bencana.

Menurut UNISDR, ***Disaster Risk Reduction (DRR)*** atau **Pengurangan Risiko Bencana (PRB)** bertujuan untuk mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kekeringan dan badai, melalui etika pencegahan. Bencana sering mengikuti bahaya alam. Keparahan bencana tergantung pada seberapa besar dampak bahaya pada masyarakat dan lingkungan. Skala dampak pada gilirannya tergantung pada pilihan yang kita buat untuk hidup kita dan lingkungan kita. Pilihan ini berhubungan dengan bagaimana kita mengelola bahan pangan kita, di mana dan bagaimana kita membangun rumah kita, seperti apa pemerintah yang kita miliki, cara kerja sistem keuangan dan bahkan apa yang diajarkan di sekolah. Setiap keputusan dan tindakan yang membuat kita lebih rentan terhadap bencana atau lebih tahan terhadap bencana tersebut.

Pengurangan risiko bencana adalah konsep dan praktek mengurangi risiko bencana melalui upaya sistematis untuk menganalisa dan mengurangi faktor-faktor penyebab bencana. Mengurangi paparan terhadap bahaya, mengurangi kerentanan manusia dan properti, manajemen yang tepat terhadap pengelolaan lahan dan lingkungan, dan meningkatkan kesiapan terhadap dampak bencana merupakan contoh pengurangan risiko bencana.

Pengurangan risiko bencana meliputi disiplin seperti manajemen bencana, mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana, tetapi PRB juga merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan. Agar kegiatan pembangunan dapat berkelanjutan mereka juga harus mengurangi risiko bencana. Di sisi lain, kebijakan pembangunan yang tidak sehat akan meningkatkan risiko bencana dan kerugian bencana. Dengan demikian, PRB melibatkan setiap bagian dari masyarakat, pemerintah, sektor profesional dan swasta untuk secara bersama-sama bertindak.

3. Mewujudkan Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana.

Untuk mewujudkan masyarakat yang siap siaga menghadapi bencana BPBA telah melaksanakan simulasi/drill tahun anggaran 2018 di satu kabupaten yaitu Aceh Besar (Pulo Aceh). Pelaksanaan simulasi/drill bencana dikondisikan sedemikian rupa seolah telah terjadi bencana yang nyata dan telah menimbulkan kerentanan yang sedemikian mengkhawatirkan dengan maksud untuk menguji kemampuan masyarakat dalam menentukan sikap dan tindakan untuk menyelamatkan diri secara baik dan benar. Simulasi tanggap bencana merupakan merupakan alat atau instrumen untuk menguji tingkat pengetahuan, pemahaman, respon dan tindakan warga ketika akan, saat dan pasca terjadi bencana.

Tujuan akhir atau *outcome* yang diharapkan adalah peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat pemerintahan *gampong* selaku pemerintahan mikro yang paling terdampak tentang pemahaman mengenai kesiapsiagaan bencana. Simulasi/drill bencana Gempa dan Tsunami di Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar 1 (satu) kali yang diikuti oleh 507 peserta yang terdiri dari masyarakat, petugas BPBD Kabupaten Aceh Besar, TNI, POLRI, PMI, Siswa Sekolah Dasar SD, SMP, SMA dan masyarakat sekitar lokasi pelaksanaan drill.

Sasaran Meningkatnya Koordinasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

1. Terwujudnya koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara komprehensif

Sebagai bagian dari keseluruhan penanggulangan bencana, implementasi tahapan rehabilitasi harus dikaitkan dengan tahapan lain. Dalam pengertian ini, bukan saja kegiatan-kegiatan tahapan rehabilitasi berhubungan dengan tahap prabencana dan tanggap darurat tetapi juga berhubungan dengan tahapan rekonstruksi. Hubungan dan koordinasi antar tahapan ini sangat menentukan efektifitas dan efisiensi penanggulangan bencana. Oleh karena itu, pentahapan penanggulangan bencana semestinya tidak ditempatkan sebagai tujuan melainkan cara untuk mencapai efisiensi dan efektifitas penanggulangan bencana secara keseluruhan. Di atas pengertian ini, sinkronisasi dan koordinasi semestinya merupakan kata kunci penanggulangan bencana yang harus dilaksanakan oleh berbagai pihak.

Sasaran Meningkatnya Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana

1. Mewujudkan koordinasi pemulihan dan perbaikan daerah bencana

Strategi untuk mewujudkan tujuan tersebut dalam tahun anggaran 2018 dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. Rapat koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana diadakan di Aceh Tengah (hotel Bayu Hill) selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 06 s.d 28 September 2018 yang diikuti oleh 40 orang peserta terdiri dari pejabat bidang rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD seluruh Aceh serta pejabat dan staf jajaran BPBA.

Sasaran Meningkatnya Koordinasi Penanganan Kedaruratan dan Logistik Kebencanaan

1. Mewujudkan akurasi data kerusakan pasca bencana

Strategi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Aceh melalui bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam Tahun Anggaran 2018 untuk mewujudkan sasaran akurasi data kerusakan pasca bencana adalah dengan melakukan inventarisasi, verifikasi dan validasi kerusakan akibat bencana dengan menggunakan metode Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA). Target yang ditetapkan adalah 1 laporan JITUPASNA dan berhasil dicapai 86,41 %.

2. Terwujudnya distribusi logistik, pencarian, dan penyelamatan korban bencana yang terkendali

Masa tanggap darurat dalam situasi bencana tidak akan terlepas dari pengelolaan logistik. Selain sebagai dukungan kebutuhan utama masyarakat terkena dampak bencana juga jaminan pemulihan fungsi sosial masyarakat. Pentingnya Pengelolaan tersebut sehingga perlu adanya pedoman yang mengatur persediaan logistik dalam keadaan darurat.

Saat kejadian bencana merupakan tahap saat bencana sesungguhnya terjadi. Dalam tahap ini terdapat kegiatan tanggap darurat yaitu kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan seperti kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.

Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Pusdalops PB adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BPBA yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana. BPBA mengaktifkan fungsi Pusdalops PB mulai tahun 2015 hingga tahun sekarang berada di bawah Bidang koordinasi Kedaruratan dan Logistik dan secara hirarki bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBA.

3. Mewujudkan penilaian cepat kerusakan akibat bencana

Penilaian cepat bencana dilakukan oleh tim kaji cepat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh No. 360/318/2014 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Aceh dan Tim Kaji Cepat yang dibentuk berdasarkan Perintah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh. Tugas utama tim ini adalah melakukan *assessment* untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam

penanggulangan bencana pada saat darurat bencana. Tim kaji cepat membuat laporan *assessment* kepada Kepala Pelaksana BPBA yang mencakup; (a). lokasi kejadian bencana; (b). jumlah korban bencana; (c). kerusakan sarana/prasarana; (d). gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintah; dan (e). kemampuan sumber daya alam maupun bantuan. Laporan tersebut menjadi dasar dalam menyediakan bantuan logistik kebencanaan dan rencana tindak lanjut penanggulangan bencana.

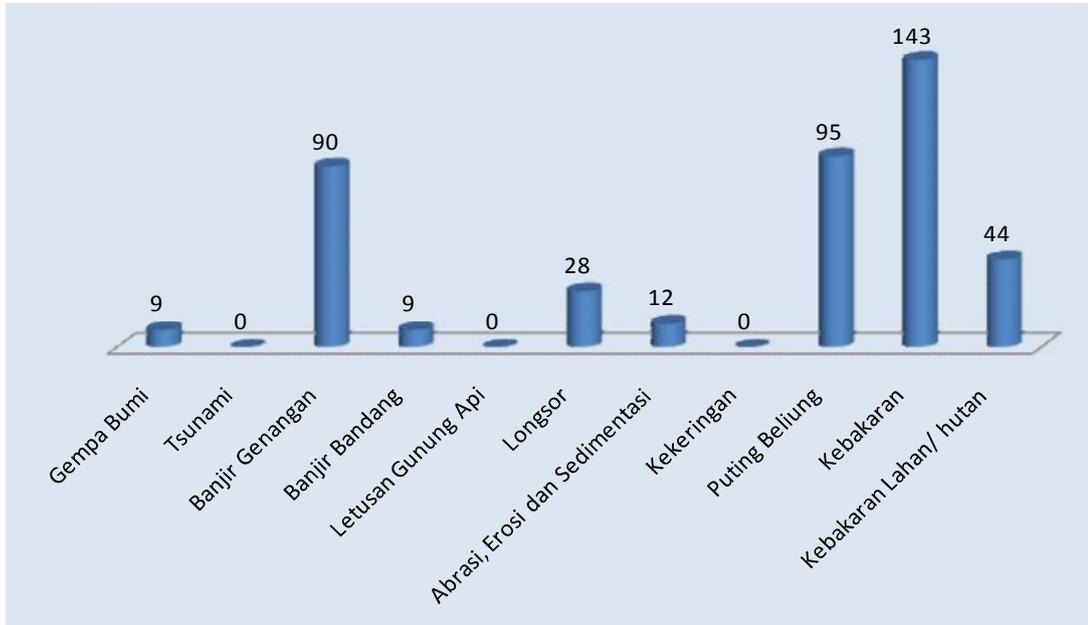
Tim kaji cepat atau TRC sekaligus melakukan pencarian dan penyelamatan korban bencana serta pendistribusian logistik. Berdasarkan laporan tahun 2018 tim ini telah melakukan tugasnya di Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireun, Kabupaten Gayo lues, Kabupaten Aceh Tenggara dan Kota Subulussam.

4. Mewujudkan fungsi Pusdalop 24 jam dalam sehari

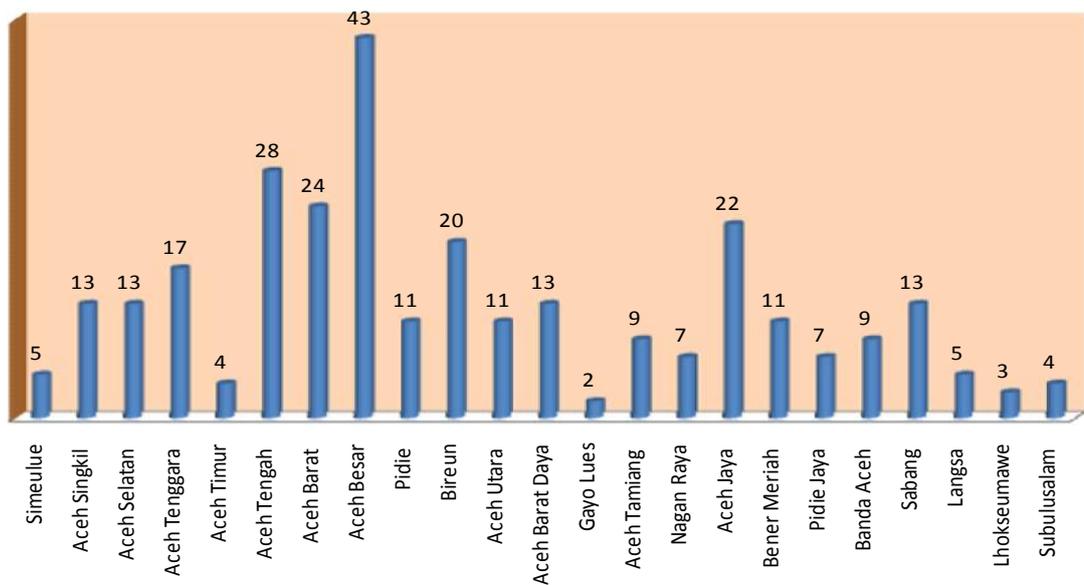
Operasional pengendalian sistem pusat kendali operasi (PUSDALOPS) penanggulangan bencana berlangsung selama 24 jam dalam satu hari tanpa jeda, out put kegiatan ini berupa data/laporan kejadian bencana, secara garis besar sebagaimana disajikan pada grafik di bawah ini:

Gambar 1.3
REKAPITULASI KEJADIAN BENCANA TAHUN 2018

FREKUENSI KEJADIAN BENCANA DI ACEH
TAHUN 2018



FREKUENSI KEJADIAN BENCANA DI SETIAP KAB/KOTA
DI ACEH TAHUN 2018



5. Mewujudkan distribusi bantuan logistik kemanusiaan yang tepat sasaran, efektif dan efisien

Pendistribusian bantuan logistik untuk korban bencana sebanyak 19 paket merupakan wujud pelayanan darurat bencana kepada masyarakat terdampak. Paket bantuan logistik secara umum terdiri dari bahan pangan dan sandang. Diharapkan dengan adanya bantuan tersebut dapat terpenuhinya sebahagian kebutuhan dasar korban bencana khususnya pada fase darurat. Cakupan layanan ini meliputi Kabupaten Aceh Selatan (2 Paket), Kabupaten Aceh Barat Daya (2 Paket), Kabupaten Aceh Barat (4 Paket), Kabupaten Aceh Jaya (2 Paket), Kabupaten Aceh Singkil (4 Paket), Kabupaten Aceh Tamiang (2 Paket), Kabupaten Nagan Raya (2 Paket), Kabupaten Simeulue (2 Paket), Kabupaten Aceh Utara (2 Paket), Kabupaten Bireun (2 Paket), Kabupaten Gayo lues, Kabupaten Aceh Tenggara (2 Paket), dan Kota Subulussam (2 Paket). Output dari kegiatan ini adalah bantuan logistik berupa bahan sandang dan pangan 30 paket, yang disalurkan pada masa darurat bencana. Secara umum komposisi paket bantuan logistik tersebut disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.7			
KOMPOSISI UMUM PAKET BANTUAN LOGISTIK KEBENCANAAN			
NO.	NAMA/JENIS/BARANG	VOLUME	SATUAN
A. KELOMPOK BAHAN PANGAN:			
1.	Beras	400	Sak
2.	Mie Instant	350	Dus
3.	Minyak Goreng	350	Liter
4.	Kecap Botol Kecil	350	Botol
5.	Saus Botol Kecil	1000	Botol
6.	Telur Ayam	6.000	Butir
7.	Ikan Kaleng Kecil	550	Kaleng
8.	Air Mineral Gelas	350	Dus
9.	Gula pasir	350	Kg
B. KELOMPOK SANDANG:			
10.	Kain Sarung	400	Lembar
11.	Seragam SD	400	Pasang
12.	Seragam SMP	400	Pasang

F. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai sasaran strategis tahun 2018 dari pagu anggaran sebesar Rp. 91.263.222.629,- telah direalisasi sebesar Rp. 83.318.634.156.- atau 91,29 %, dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 3.8
REALISASI KEUANGAN BPBA T.A 2018

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			ANGGARAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
A.	BELANJATIDAK LANGSUNG	5.624.170.000	5.462.062.914	97.12	97.12
B.	BELANJA LANGSUNG	85.639.052.629	77.856.571.242	90.91	90.91
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.780.750.105	2.598.930.222	93.46	100
	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>10.000.000</i>	<i>6.715.000</i>	<i>67.15</i>	<i>100</i>
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>312.000.000</i>	<i>239.536.264</i>	<i>76.77</i>	<i>100</i>
	<i>Penyediaan Alat Tulis Kantor</i>	<i>94.265.105</i>	<i>90.793.230</i>	<i>96.32</i>	<i>100</i>
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>50.335.000</i>	<i>50.335.000</i>	<i>100.00</i>	<i>100</i>
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>30.500.000</i>	<i>30.500.000</i>	<i>100.00</i>	<i>100</i>
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>10.000.000</i>	<i>9.878.000</i>	<i>98.78</i>	<i>100</i>
	<i>Penyediaan Makanan dan Minuman</i>	<i>157.850.000</i>	<i>139.823.450</i>	<i>88.58</i>	<i>100</i>
	<i>Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah</i>	<i>579.240.000</i>	<i>572.959.078</i>	<i>98.92</i>	<i>100</i>
	<i>Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran</i>	<i>1.536.560.000</i>	<i>1.458.390.200</i>	<i>94.91</i>	<i>100</i>
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.011.500.000	680.369.006	67.26	100
	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</i>	<i>750.000.000</i>	<i>433.596.506</i>	<i>57.81</i>	<i>100</i>
	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor</i>	<i>75.000.000</i>	<i>63.772.500</i>	<i>85.03</i>	<i>100</i>
	<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor</i>	<i>186.500.000</i>	<i>183.000.000</i>	<i>98.12</i>	<i>100</i>
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	126.100.000	125.320.0000	99.38	100
	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya</i>	<i>126.000.000</i>	<i>125.320.000</i>	<i>99.38</i>	<i>100</i>
4	Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Bencana	1.520.534.400	1.481.210.640	97.41	100
	<i>Pengurangan Risiko Bencana</i>	<i>786.766.000</i>	<i>757.106.240</i>	<i>96.23</i>	<i>95</i>
	<i>Penyusunan Rencana Kontijensi Mitigasi Bencana</i>	<i>733.768.400</i>	<i>724.104.400</i>	<i>98.68</i>	<i>95</i>
5	Program Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana	34.681.850.600	32.238.779.036	92.96	84
	<i>Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Bencana</i>	<i>255.346.000</i>	<i>113.400.000</i>	<i>44.41</i>	<i>50</i>
	<i>Koordinasi Penanggulangan Bencana</i>	<i>185.006.500</i>	<i>158.126.700</i>	<i>85.47</i>	<i>95</i>
	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana</i>	<i>33.948.967.200</i>	<i>31.733.400.236</i>	<i>93.47</i>	<i>98</i>
	<i>Penidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana</i>	<i>292.530.900</i>	<i>233.852.100</i>	<i>79.94</i>	<i>96</i>

6	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	39.025.216.264	35.119.882.375	89.99	96
	<i>Inventarisasi, Verifikasi dan Validasi Kerusakan Akibat Bencana</i>	136.281.500	128.686.134	94.43	98
	<i>Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana</i>	14.695.733.410	13.041.969.640	88.75	100
	<i>Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik Dalam Wilayah Terjadinya Bencana</i>	23.256.338.354	21.190.517.540	91.12	100
	<i>Koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana</i>	712.803.500	565.097.689	79.28	95
	<i>Koordinasi Penilaian Kerusakan Bencana</i>	224.059.500	193.611.372	86.41	90
7	Program Kedaruratan dan Logistik Bencana	6.493.101.260	5.612.079.963	86.43	95
	<i>Penilaian Cepat Kerusakan Akibat Bencana</i>	614.441.500	592.898.038	96.49	100
	<i>Pengendalian Sistem Pusat Kendali Operasional (PUSDALOPS) Penanggulangan Bencana</i>	652.987.600	555.045.925	85.00	98
	<i>Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana</i>	5.225.672.160	4.464.136.000	85.43	85

Sumber: Laporan Keuangan BPBA Tahun 2018.

Sedangkan selama periode 2014 s.d 2018 jumlah realisasi adalah sebesar Rp. 184.532.206.450,- atau 80.32 % dari total anggaran sebesar Rp. 242.642.235.667 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.9				
REALISASI ANGGARAN BPBA 2014 – 2018				
No.	Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase (%)
1.	2014	30.722.518.720	27.898.346.281	90,81
2.	2015	24.998.333.116	22.504.091.349	90,02
3.	2016	26.463.723.000	23.827.423.190	90,04
4.	2017	69.194.438.202	26.983.711.474	39,00
5.	2018	91.263.222.629	83.318.634.156	91,29
JUMLAH		242.642.235.667	184.532.206.450	80.32

Sumber: Laporan Keuangan BPBA 2014 – 2018.

Perkembangan capaian kinerja kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana periode 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018 sebagaimana tertera pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.10

PERKEMBANGAN PERSENTASE KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI BENCANA

Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Persentase Kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana	67%	68%	91%	106 %	85,50

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Desember 2018

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis yang ditunjukkan oleh BPBA tahun anggaran 2018 dan perkembangan dari tahun - tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan tujuan dan sasaran. Secara umum capaian sasaran strategis 2017 – 2022 menunjukkan perkembangan yang signifikan, dan dapat mencapai target.

BPBA yang diberi tugas, tanggung jawab, dan amanah untuk melakukan penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana, bersyukur karena di penghujung tahun 2018 pelayanan penanggulangan bencana yang meliputi program penguatan kelembagaan penanggulangan bencana, pencegahan dini dan kesiapsiagaan bencana, koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana serta penanganan kedaruratan dan logistik kebencanaan dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya sehingga tujuan akhir berupa upaya untuk mewujudkan prioritas pembangunan Pemerintah Aceh tahun 2017 - 2022 untuk pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan dapat terlaksana dengan baik.

Di sisi lain pada tingkat pelaksanaan program dan kegiatan pada seluruh bidang menunjukkan capaian yang optimal/baik, meskipun terdapat catatan realisasi serapan keuangan sedikit lebih rendah, yaitu target persentase penanganan bencana untuk tahun 2018 sebesar 92 % dengan realisasi sebesar 91,29 %. Realisasi tersebut sedikit lebih kecil dari pada target sebesar 0,71 %. Hal ini disebabkan oleh faktor – faktor yang menyebabkan kurang tercapainya target adalah Pada program Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana, Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana pada Belanja Barang yang diserahkan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota (Kabupaten Aceh Selatan), sub kegiatan Pembangunan Gudang Logistik BPBD Aceh Selatan yang bersumber dari DOKA, anggaran yang terserap sebanyak 82,95 %. Hal ini disebabkan adanya keterlambatan pekerjaan yang tidak sesuai dengan tenggat waktu yang tertera di dalam kontrak pekerjaan sehingga sebanyak 17,05 % tidak dapat terealisasi. Sedangkan pada Program Kedaruratan dan Logistik Bencana, kegiatan Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana pada Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga realisasi sebesar 83,99 %. Hal ini dikarenakan penyaluran bahan logistik rumah tangga yang disalurkan oleh Pemerintah Aceh melalui Badan Penanggulangan Bencana Aceh harus berdasarkan permintaan logistik dari kabupaten/kota yang mengalami

bencana berupa Surat Pernyataan Bencana dari Bupati/Walikota dan permintaan kebutuhan logistik bencana dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sehingga sebesar 16,01 % tidak dapat terealisasi. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tingkat capain kinerja SKPA BPBA T.A 2018 yaitu $\geq 75\%$ dari target yang ditetapkan. Dengan demikian dapat dikatakan **BERHASIL**.

Badan Penanggulangan Bencana Aceh

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 35 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Aceh, Satuan Kerja Perangkat Aceh dan Biro di Lingkungan Pemerintah Aceh, di bawah ini merupakan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Aceh.

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET				
				2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Menurunnya Risiko Bencana	Persentase Sekolah SLTA/SMK/ SLB Siaga Bencana	%	65	70	80	85	95
		Persentase Peran Aktif Masyarakat dalam Simulasi/Drill Bencana	%	80	85	90	95	100
		Indeks waktu respon terhadap darurat bencana	%	65	70	75	85	95
		Persentase Kabupaten/Kota penerima bantuan logistik dan peralatan darurat bencana pada masa tanggap darurat	%	75	80	96	95	95
		Persentase Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	%	60	65	70	75	85



PERJANJIAN KINERJATAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H.T. AHMAD DADEK, SH
Jabatan : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : drh. IRWANDI YUSUF, M.Sc
Jabatan : GUBERNUR ACEH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, ,2018

Pihak Kedua,



drh. IRWANDI YUSUF, M.Sc

Pihak Pertama,



H.T. AHMAD DADEK, SH

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH**

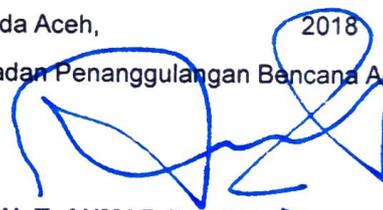
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penanggulangan bencana	- Persentase sarana dan prasana pendukung penanggulangan bencana	85,50%
2.	Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah kab/kota dalam menghadapi bencana	- Persentase pemerintah kabupaten/kota siaga bencana	85,50%
3.	Meningkatnya koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	- Persentase rekomendasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang ditindaklanjuti	90,00%
4.	Meningkatnya fungsi layanan publik dalam wilayah terjadinya bencana	- Persentase fungsi layanan publik dalam wilayah terjadinya bencana	95,55%
5.	Meningkatnya perbaikan lingkungan daerah bencana	- Persentase perbaikan lingkungan daerah bencana	95,50%
6.	Meningkatnya koordinasi penanganan kedaruratan dan logistik kebencanaan	- Persentase ketepatan waktu, jenis bantuan dan kebutuhan korban bencana pada masa tanggap darurat	80,00%

Program

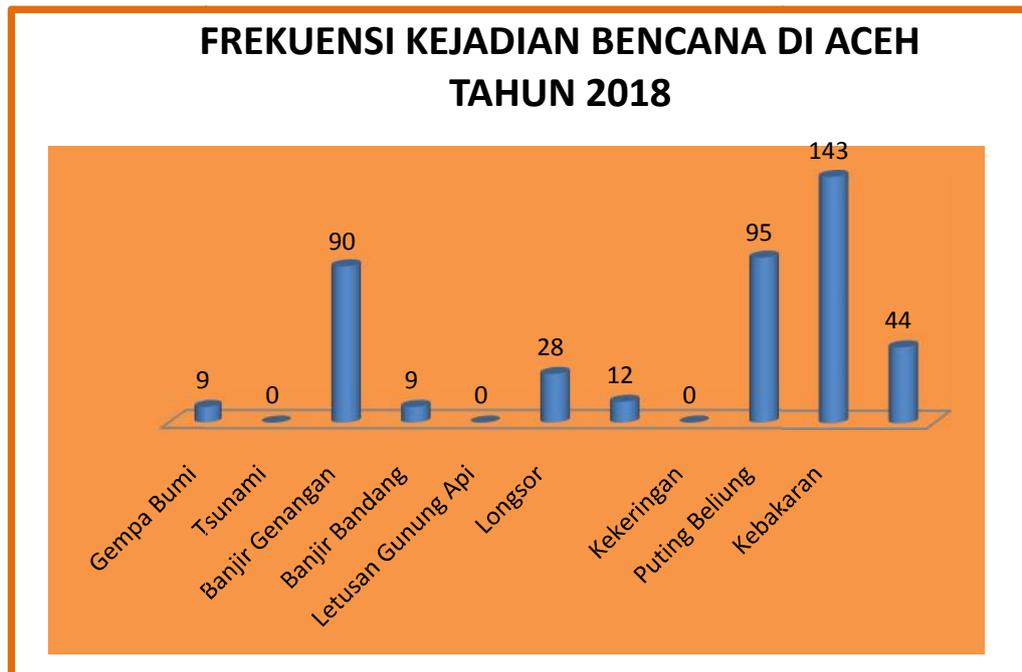
	Anggaran
1. Program Penguatan Kelembagaan Penanggulangan bencana	Rp 34.681.850.600
2. Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Bencana	Rp 1.520.534.400
3. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Rp 39.025.216.264
4. Program Kedaruratan dan Logistik Bencana	Rp 6.493.101.260

Gubernur Aceh

 drh. IRWANDI YUSUF, M. Sc

Banda Aceh, 2018
 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh

 H. T. AHMAD DADEK, SH

REKAPITULASI KEJADIAN BENCANA TAHUN 2018



Bencana yang paling banyak terjadi yaitu kebakaran pemukiman sebanyak 143 kali kejadian, disusul oleh puting beliung 93 kali, banjir genangan 90 kali dan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 44 kali kejadian. Wilayah yang paling banyak mengalami kejadian Bencana di Tahun 2018 adalah Kabupaten Aceh Besar, disusul Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Jaya, Bireuen dan Aceh Tenggara. Kebakaran pemukiman paling banyak terjadi di Aceh Besar sebanyak 18 kali kejadian, Aceh Tenggara 7 kali dan aceh barat 6 kali kejadian. Kebakaran Hutan dan Lahan juga masih banyak terjadi di Aceh Besar, Aceh Tengah dan Aceh Barat. Sedangkan Banjir genangan paling banyak terjadi Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Tamiang, Bireuen, Aceh Jaya dan Aceh Barat. Sedangkan Banjir bandang seringkali menerjang Kabupaten Aceh Tenggara, sebanyak 4 kali kejadian, terakhir terjadi pada tanggal 31 Desember 2018 kemarin. Melihat adanya bencana Longsor di Sukabumi awal tahun 2019 ini, di Aceh juga banyak potensi terjadinya Longsor seperti yang sudah terjadi di Aceh Tengah sebanyak 9 kali, dan Aceh Barat 4 kali. Sedangkan Puting beliung paling banyak di Kota Sabang dan Aceh Besar, dan terakhir abrasi paling banyak terjadi di Aceh Barat Daya. Dampak yang ditimbulkan akibat bencana di Aceh Tahun 2018 antara lain banyaknya masyarakat yang terdampak akibat bencana sebanyak 30.763KK/, 110.624 Jiwa, pengungsi sebanyak 10.754/36.696 Jiwa, yang meninggal dunia akibat bencana sebanyak 46 orang, dan Luka-luka sebanyak 33 orang. Kerugian akibat bencana yang paling banyak dialami oleh Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp.239,5 milyar, disusul Aceh Tenggara Rp. 81,9 M,- Aceh

Barat Rp. 81,8 milyar, Aceh Besar RP. 68 milyar dan Bener Meriah sebesar Rp. 63,5 milyar.

Selama tahun 2018 bencana yang terjadi merupakan bencana dengan skala kabupaten/kota sehingga ditetapkan status tanggap darurat bencana yaitu :

- Bencana banjir yang terjadi di kabupaten simeuleu pada tanggal 12 Oktober 2018 merendam rumah sebanyak 623 kepala keluarga dengan 2128 jiwa terdampak.
- Bencana banjir di Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 28 September 2018 dengan 23 desa/gampong terdampak akibat bencana banjir ini, akibat dari bencana yang ditimbulkan adalah rusaknya sarana dan prasarana umum dan pemerintah yaitu permukiman penduduk, lahan pertanian, lahan perkebunan, jalan, jembatan dan hilangnya benda masyarakat.
- Bencana banjir di Kabupaten Aceh Taminag pada tanggal 6 Oktober 2018 merendam sebanyak 468 kepala keluarga. Akibat dari bencana ini rusaknya tanggul di 3 tanggul di desa/gampong.
- Bencana banjir di Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 11 oktober 2018 dan bencana tanah longsor pada tanggal 12 oktober 2018 merendam 8 kecamatan. Akibat dari bencana tersebut mengakibatkan terendahnya rumah penduduk, sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan. Kantor pemerintah, fasilitas umum dan tempat-tempat umum masyarakat lainnya, terputusnya jalan akibat tingginya air permukaan jalan, terputusnya jalan akibat jalan serta tertimbunya rumah penduduk akibat longsor , terputusnya jalan akibat ambruknya jembatan & box culvert, terendahnya lahan pertanian, ternak dan perkebunan milik masyarakat dan terganggunya aktifitas/transportasi daratdan laut.
- Bencana banjir di kabupaten Nagan Raya pada tanggal 1 Oktober 2018 sebanyak 6 (enam) kecamatan terendam. Akibat dari bencana ini terendahnya rumah penduduk, sarana pendidikan, sarana ibadah dan sarana kesehatan dan lahan pertanian., rusaknya rumah penduduk, penumpukan material lumpur di muara sungai, tersumbatnya saluran/drainase pertanian, rusaknya jembatan dan jalan beserta tebing dan pendangkalan sungai.
- Bencana banjir di kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 1 Oktober 2018 sebanyak 5 kecamatan merendam 400 kepala keluarga. Akibat dari bencana ini mengakibatkan rusaknya sarana ibadah, sarana pendidikan, infrastruktur jalan, jembatan, saluran irigasi dan persawahan serta perkebunan masyarakat.
- Bencana banjir di Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 21 Maret 2018 sebanyak 11 (sebelas) kecamatan terendam. Akibat dari bencana banjir ini mengakibatkan rusaknya permukiman penduduk, sarana ibadah,

sarana pendidikan, infrastruktur jalan, jembatan saluran irigasi, persawahan dan perkebunan masyarakat.

- Bencana di kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 15 Oktober 2018 sebanyak 7(tujuh) kecamatan sebanyak 11263 jiwa dan 3755 kepala keluarga. Akibat dari bencana ini terendahnya fasilitas umum dan jembatan serta terganggunya saluran air bersih.